

IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS KEPADA MASYARAKAT MEMBUTUHKAN MELALUI PT POS INDONESIA CABANG SURABAYA

Mei Retno Adiwati¹⁾, Reka Januar Ariyanti²⁾

^{1),2)}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: adiwatv66@gmail.com¹⁾, 22012010038@student.upnjatim.ac.id²⁾

***Abstract:** The rice food aid distribution program through PT Pos Indonesia Surabaya Branch aims to meet the basic needs of poor and vulnerable communities. This program evaluation assesses the effectiveness of the distribution process involving stages of surveys, officer training, planning, and implementation of distribution. Although the extensive distribution network and the use of information technology have increased efficiency, there are still a number of obstacles, such as inconsistencies in recipient data and difficulty reaching remote areas. This evaluation identifies these obstacles and offers recommendations for improvement, such as strengthening data validation and improving coordination between PT Pos, local governments, and related institutions. The results of the evaluation are expected to be a reference for improving program implementation in the future.*

***Keywords:** Distribution of Food Aid, PT Pos Indonesia, Distribution Effectiveness, Constraints and Evaluation*

Abstrak: Program penyaluran bantuan pangan beras melalui PT Pos Indonesia Cabang Surabaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan. Evaluasi program ini menilai efektivitas proses distribusi yang melibatkan tahapan survei, pelatihan petugas, perencanaan, dan pelaksanaan penyaluran. Meski jaringan distribusi yang luas serta penggunaan teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi, masih terdapat sejumlah hambatan, seperti ketidaksesuaian data penerima dan kesulitan menjangkau wilayah terpencil. Evaluasi ini mengidentifikasi kendala tersebut dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan, seperti memperkuat validasi data dan meningkatkan koordinasi antara PT Pos, pemerintah daerah, serta lembaga terkait. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki pelaksanaan program di masa depan.

Kata Kunci: Penyaluran Bantuan Pangan Beras, PT Pos Indonesia, Efektivitas Distribusi, Kendala dan Evaluasi

PENDAHULUAN

Penyaluran bantuan pangan beras merupakan langkah penting pemerintah untuk memastikan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau terdampak bencana

tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia (Kementerian Sosial RI, 2021). Program ini bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu atau rentan agar kebutuhan pangan sehari-hari mereka tetap terpenuhi, terutama dalam situasi sulit (Widodo, 2020). PT Pos Indonesia, sebagai lembaga negara dengan jaringan distribusi yang luas dan sistem logistik yang mumpuni, dipercaya untuk mendistribusikan bantuan ini ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil (Prasetyo & Hidayat, 2019). Di Surabaya, kota dengan populasi padat, penyaluran melalui PT Pos menjadi krusial untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu dan sesuai sasaran.

Meski sistem distribusi bantuan beras ini sudah cukup efektif, berbagai tantangan masih dihadapi, baik dalam strategi, pelaksanaan, maupun dampaknya pada penerima manfaat. Penyaluran melalui PT Pos Surabaya dilakukan untuk mempermudah proses distribusi, dimulai dengan pendataan penerima oleh pemerintah atau lembaga terkait (Halim, 2022). Data ini kemudian diproses oleh PT Pos menggunakan teknologi untuk mengelola dan memantau distribusi, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran (Santoso, 2021). Dengan jaringannya yang tersebar luas, PT Pos juga mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil.

Proses penyaluran ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengumpulan hingga pengiriman ke lokasi penerima, dengan dukungan tenaga lapangan yang terlatih serta jaringan kantor cabang di Surabaya. Program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, dengan membantu meringankan beban ekonomi dan memenuhi kebutuhan pokok. Namun, kendala seperti sulitnya akses ke wilayah tertentu dan koordinasi antara PT Pos dan pemerintah daerah masih menjadi hambatan dalam kelancaran distribusi (Putra & Lestari, 2021).

Program ini bertujuan memastikan bantuan beras dapat disalurkan dengan efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, khususnya kepada keluarga miskin atau rentan. Selain itu, program ini juga berfokus pada pengentasan berbagai kendala, seperti hambatan akses dan kurangnya koordinasi, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.

Kajian

Implementasi sebuah kebijakan atau program adalah rangkaian keputusan yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk bertindak, yang diambil oleh instansi atau pejabat pemerintah dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan administrasi (Dunn, 2003:109). Penyaluran bantuan pangan merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya bagi keluarga miskin atau rentan yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari (Kementerian Sosial RI, 2021).

METODE PENELITIAN

Penyaluran bantuan pangan beras melalui PT Pos di Surabaya dilakukan melalui tahapan terstruktur untuk memastikan distribusi berjalan efektif. Tahap awal berupa survei lapangan bertujuan mengidentifikasi kendala dalam distribusi dan kondisi penerima bantuan. Selanjutnya, petugas lapangan mendapatkan pelatihan terkait prosedur distribusi dan penggunaan teknologi pemantauan. Dalam tahap perencanaan, PT Pos bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menetapkan daftar penerima bantuan dan menyusun strategi distribusi yang efisien. Penyaluran dilakukan melalui kantor cabang dan kelurahan dengan memanfaatkan sistem Postal General Cargo (PGC) untuk memastikan data penerima sesuai sasaran. Setelah itu, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas distribusi, mengidentifikasi kendala, dan mengevaluasi dampak program sebagai dasar perbaikan ke depan. Penyaluran bantuan direncanakan berlangsung pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Survey

Pada tahap pertama, tim PT Pos Indonesia cabang Surabaya melakukan survei di semua lokasi yang akan digunakan untuk penyaluran bantuan pangan beras. Survei ini bertujuan untuk memastikan lokasi penyaluran sudah siap, seperti kelurahan, kantor cabang, atau tempat umum lainnya. Tim juga memeriksa data penerima bantuan untuk memastikan data tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu, survei dilakukan untuk mengetahui akses ke wilayah yang sulit dijangkau dan menyusun rencana distribusi yang lebih mudah dan efisien. Hasil survei ini akan digunakan untuk

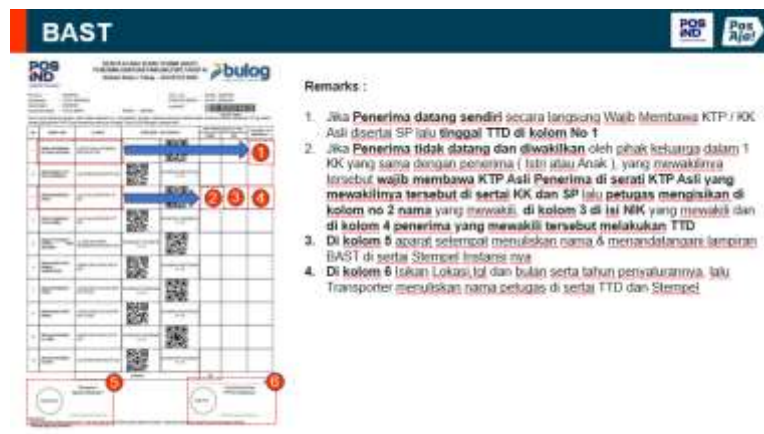
menentukan jumlah bantuan yang disalurkan di setiap lokasi, jadwal penyaluran, serta kebutuhan tambahan seperti alat angkut dan tenaga pendukung. Dengan survei ini, tim memastikan bantuan dapat disalurkan dengan lancar dan sampai ke orang yang benar-benar membutuhkan.



Gambar 1. Lokasi penyaluran bantuan pangan beras

2. Tahap Pelatihan

Tahap pertama dalam proses distribusi adalah orientasi, yang bertujuan memberikan pemahaman kepada petugas mengenai pengisian dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penggunaan sistem Postal General Cargo (PGC). Dalam orientasi ini, petugas diberi penjelasan tentang pentingnya dokumen BAST, cara pengisiannya, serta informasi yang perlu dicantumkan, seperti data penerima, jenis bantuan, dan tanda tangan pihak terkait. Untuk menghindari kesalahan, petugas juga dilatih melalui simulasi pengisian BAST secara mendetail. Selain itu, mereka diajarkan cara menggunakan PGC guna memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai prosedur, termasuk pengecekan kelengkapan dokumen, keadilan penerimaan bantuan, dan solusi untuk kendala yang mungkin timbul. Orientasi ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dipahami, sehingga petugas dapat bekerja secara efektif dan sesuai standar.



Gambar 2. materi pengisian BAST

Tahap berikutnya adalah simulasi, yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada petugas dalam melaksanakan prosedur yang telah dipelajari. Pada tahap ini, petugas berlatih mengisi BAST dan menggunakan PGC melalui skenario realistis yang menyerupai situasi sebenarnya di lapangan. Mereka diminta mengisi data penerima, jenis bantuan, jumlah, dan detail lainnya pada BAST, sekaligus memeriksa keakuratan data tersebut. Selanjutnya, petugas menggunakan PGC untuk memastikan dokumen lengkap dan proses distribusi sesuai standar, mulai dari penerimaan barang hingga penyerahan kepada penerima. Selama simulasi, pengawas memberikan umpan balik dan membantu memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Latihan ini bertujuan memastikan petugas memahami prosedur dengan baik dan merasa percaya diri dalam menjalankan tugas mereka di lapangan.

3. Tahap perencanaan

Setelah menerima data penerima bantuan yang telah diverifikasi, PT Pos menyusun jadwal distribusi dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Salah satunya adalah prioritas wilayah, di mana daerah yang paling terpengaruh atau sulit dijangkau menjadi prioritas utama dalam pengiriman bantuan. Misalnya, wilayah pedalaman atau daerah yang terdampak bencana alam seperti banjir akan didahulukan distribusinya dibandingkan dengan daerah yang lebih mudah dijangkau. PT Pos juga memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk jumlah petugas, kendaraan, dan fasilitas penyimpanan, untuk mendukung kelancaran distribusi. Selain itu, perencanaan

waktu juga diperhitungkan dengan cermat agar distribusi bantuan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Proses perencanaan juga melibatkan koordinasi erat dengan tim lapangan untuk memastikan distribusi berjalan tanpa hambatan. PT Pos memberikan informasi rinci kepada petugas distribusi dan tim terkait jadwal, lokasi penempatan, serta pembagian tugas masing-masing. Tanggung jawab ditetapkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih, seperti penugasan petugas yang akan melakukan verifikasi data penerima, juru foto untuk memastikan penerima bantuan sesuai, dan petugas yang bertanggung jawab atas distribusi beras. Selain itu, prosedur standar operasional (SOP) juga disampaikan untuk mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi, seperti jika penerima bantuan tidak membawa dokumen yang diperlukan, seperti undangan, KTP, Kartu Keluarga, atau surat pendukung lainnya.

JADWAL PENYALIBAN BANTUAN PANGAN HARI JUMAT, 06 DESEMBER 2024

NO	KELOMPOK	KOWIL / DESKOR / PUSKERT / KOTIPAN	SPY / KEM	LOKASI	ALOKASI	PERUBAHAN	SIKOR	PETUGAS	LOKASI TAMBAH
1	KEPUNGAN	KUNYU MILE	M KEM	KAW KEL KUNYU MILE	300	DESIANA TERMAKAS BERASA	MAKING LANGSUNGAN DE	BERA PRADI KRUTIMARAN	
2	WONOREJO	KONKAPINHI	M KEM	KAW KEL WONOREJO	300	TABARA BELLATHREIDAN	Muhammad Rafi Baki LUCIANA Adha Zahara	ELWARTO / FE	
3	TANJUNGPINANG	SEBAPULARA	KEM	KAW KEL TANJUNGPINANG	300	AMARIS BALARA PRINCE ANVALL/ADIA DONA SIB SPATI	STI KUSUMAH / FE MANSAR ARIESTY / FE	RAMANT HOKART	
4	SEMARANG	KUNYU MILE	M KEM	SEMARANG / KEM / KUNYU MILE	300	RAMBA SPOLA KUNYA SUCI LEBER BUCALARI NADIA RAHILAL NISAM	NICHIAH BUSTAM AHU / FE RIZKA ANA BULLANANINDYA	INDIKA ABU WIGARA	
5	BOJONEgara	PAJAJ	PAJAJ	KAW KEL BOJONEgara	300	ALISA FERENKA AMALIA	PRIMA RIVANTO	SANI BELUMBAR	
6	NGASE	PAJAJ/NGASE MARE	PAJAJ	KAW KEL NGASE	300	HELIA JANDRA JARIFER	ANIS ANURACHMA	DANI BELUMBAR	
7	BUNDEUT BOLA	PAJAJ/PAJAJ	PAJAJ	KAW KEL BUNDEUT BOLA	300	ALFAN DWI CAHYO	CHRISTINA NOVANTO / FE	DANI BELUMBAR	
8	WONOREJO	KUNYU MILE	SPY / KEM	KAW KEL WONOREJO	300	JANIS MARISSA ARUNKA SYRA ZALAWATI	MARICA DWI ALICE / FE DIA DWI KURNIA / FE	SANI BELUMBAR	
9	WONOREJO	PAJAJ/PAJAJ	PAJAJ	KAW KEL WONOREJO	300	ADILLA RATNA NIKI EMANTI	FENNY WENI BRITTA / FE	SANI BELUMBAR	
10	WONOREJO	PAJAJ/PAJAJ	PAJAJ	KAW KEL WONOREJO	300	JANUSON MUR ADRIAN APRIKA ISRA DEWI MOH AJI MABRIL	NOVA NIKI RYDI / FE AZIZ GHAZALI WANDIPUR PUTRA	BUDIMARAN	
11	TANJUNGPINANG	SEBAPULARA	KEM	KAW KEL TANJUNGPINANG	300	YVA MERY WARDANI DIPAN SAMARINDA SETYANI	MURAHATI / FE ZAMRA SALBARA	EDRIC RIZDI HAZMI	

Gambar 3. Surat tugas dan jadwal petugas

No	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
26	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
27	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
28	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
29	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
30	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
31	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
32	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
33	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
34	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
35	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
36	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
37	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
38	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
39	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
40	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
41	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
42	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
43	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
44	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
45	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
46	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
47	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
48	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
49	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK
50	WILAYAH/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN & WILAYAH/KABUPATEN	NO	WILAYAH	KECAMATAN	KELOMPOK

1) Semua petugas wajib datang sebelum Pukul 07.00 WIB
Jam Pelayanan sd 14.00 WIB

2) Untuk SPV agar diperingatkan User PDC Petugas juru bagi Beras sesuai trik label setor masing-masing dan di infokan ke petugas juru bagi

3) Surat tugas ini sifatnya wajib untuk dilaksanakan, jika berhalangan hadir silahkan untuk mencari pengganti sendiri

Ketua Setgas
M. W. [Signature]
Nippon 971331790

Gambar 4. Surat tugas dan jadwal petugas

4. Tahap Penyaluran Bantuan Pangan Beras

Penyaluran bantuan beras diawali dengan persiapan berupa pengiriman beras ke lokasi distribusi satu hari sebelum jadwal untuk memastikan bantuan tersedia tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Sebelumnya, penerima diinformasikan mengenai jadwal dan lokasi pengambilan melalui surat undangan, pesan singkat, atau media lainnya. Mereka juga diminta membawa dokumen pendukung, seperti undangan, KTP, KK, serta dokumen tambahan jika diperlukan.

Pada hari penyaluran, penerima datang sesuai jadwal dan mengikuti proses antrian yang telah diatur. Ketika tiba gilirannya, penerima menyerahkan dokumen kepada petugas verifikasi untuk memastikan data sesuai dengan daftar dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Jika data cocok, penerima menandatangani BAST sebagai bukti penerimaan bantuan, dan undangannya diberi paraf serta tanggal oleh petugas.



Gambar 5. Verifikasi data penerima

Tahap berikutnya adalah dokumentasi digital menggunakan teknologi Postal General Cargo (PGC). Petugas memindai barcode pada undangan, mengambil foto penerima bersama dokumen yang diserahkan, dan menyimpan bukti tersebut secara digital untuk keperluan administrasi. Setelah itu, penerima diarahkan ke bagian koordinasi untuk mengambil beras yang telah disiapkan sesuai kuota. Mereka juga diminta memastikan jumlah dan kualitas beras sebelum meninggalkan lokasi.



Gambar 6. Bukti penerima bantuan



Gambar 7. Bukti penerima bantuan

Setelah semua bantuan disalurkan, penyelenggara mencatat data penerima secara manual dan digital untuk menjamin transparansi dan akurasi. Laporan yang mencakup jumlah penerima, rincian bantuan, dan dokumentasi disusun sebagai bukti administrasi. Tahap akhir berupa evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk menilai efektivitas proses, termasuk pengelolaan antrian dan kesesuaian data, guna perbaikan penyaluran di masa mendatang. Dengan mekanisme ini, proses distribusi bantuan beras diupayakan berlangsung tertib, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.



Gambar 8. Penerimaan beras

5. Evaluasi

Tahap evaluasi dimulai dengan pengumpulan data mengenai hasil distribusi, seperti jumlah bantuan yang berhasil disalurkan. Data ini diperoleh dari laporan tim lapangan dan catatan yang dihasilkan oleh sistem teknologi PGC. Misalnya, PT Pos dapat menganalisis apakah semua penerima di daerah terpencil telah menerima bantuan sesuai jadwal atau apakah ada masalah seperti keterlambatan pengiriman di wilayah tertentu.

Selanjutnya, fokus evaluasi adalah mengidentifikasi masalah yang muncul selama proses distribusi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan, seperti ketidaksesuaian data penerima atau penerima yang tidak mengambil bantuan. Sebagai contoh, jika ditemukan banyak ketidakakuratan data penerima saat penyaluran, evaluasi akan meninjau apakah metode komunikasi dengan penerima perlu diperbaiki dan apakah pembaruan data perlu dilakukan setelah penyaluran untuk mencegah masalah serupa terjadi di distribusi selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyaluran bantuan pangan beras melalui PT Pos Indonesia Cabang Surabaya telah menunjukkan efektivitasnya dalam membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan pokok. Jaringan distribusi yang luas dan penerapan teknologi informasi memungkinkan bantuan dapat menjangkau wilayah terpencil dengan lebih efisien. Proses distribusi dilakukan secara terstruktur melalui tahapan survei, pelatihan petugas, perencanaan, penyaluran, dan evaluasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti ketidaksesuaian data penerima, sulitnya menjangkau daerah terpencil, serta kurangnya koordinasi antara PT Pos dan pemerintah daerah. Evaluasi yang dilakukan dapat membantu mengidentifikasi masalah tersebut untuk dijadikan bahan perbaikan ke depan.

Saran

Untuk meningkatkan keberhasilan program, validasi data penerima perlu diperkuat agar bantuan tepat sasaran, dan koordinasi antara PT Pos, pemerintah daerah, serta lembaga terkait harus ditingkatkan untuk memastikan kelancaran distribusi. Penambahan fasilitas seperti alat angkut dan tenaga kerja, terutama di wilayah sulit dijangkau, juga diperlukan. Selain itu, pengembangan sistem teknologi seperti PGC harus terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemantauan distribusi. Evaluasi berkala menjadi hal penting untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan perbaikan dapat dilakukan sebelum penyaluran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sosial RI. (2021). Laporan Penyaluran Bantuan Pangan.
- Widodo, S. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Beras di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial*.
- Prasetyo, A., & Hidayat, R. (2019). Peran PT Pos Indonesia dalam Distribusi Bantuan Pangan. *Jurnal Logistik dan Manajemen*.
- Halim, M. (2022). Pendataan Penerima Bantuan Sosial: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Santoso, D. (2021). Teknologi dalam Distribusi Bantuan Pangan: Studi Kasus PT Pos Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi*.

- Putra, Y., & Lestari, N. (2021). Kendala dalam Penyaluran Bantuan Pangan Beras: Tinjauan Empiris. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*.
- SITUMORANG, Y., Poti, J., & Okparizan, O. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA TELUK SASAH KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Hidayat, A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo).
- DELVIA M, D. M. (2023). PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN HAMBATAN PELAKSANAANNYA DI WILAYAH KELURAHAN BALIASE KABUPATEN LUWU UTARA (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- SAKINAH, N. (2024). PENGARUH DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DESA MELAYU BESAR TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN ROKAN HILIR PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Harahap, L. Y. (2021). Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 48 tentang evaluasi penerima manfaat program keluarga harapan Desa Ujung Gading Kabupaten Padang Lawas (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).
- Putri, N., Lorenzia, R., Nella, R., & Imanuari, V. (2024). Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 774-782.
- Nurfattah, M., Jalil, I., & Harmen, H. (2024). PENGARUH KINERJA KARYAWAN KANTOR POS CABANG MEULABOH TERHADAP KEBERHASILAN DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN BERAS DI DESA PADANG SEURAHET. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEM)*, 6(3).